

1. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Kualitas pelayanan publik pada sebuah daerah menjadi perhatian bersama. Peningkatan kualitas pelayanan publik sangat penting dijalankan bagi pemerintah demi terselenggaranya kepuasan kerja pada masyarakat. Para pejabat publik, komponen- komponen pada masyarakat sipil serta aspek bisnis bersama mempunyai kepentingan pada perbaikan kinerja pelayanan publik. Sebagaimana dipahami, tujuan pokok sektor publik yakni memberikan pelayanan publik bukan untuk mendapat keuntungan sebanyak- banyaknya. Namun, hingga saat ini pemerintah belum bisa memahami arti dari pelayanan yang harus didapatkan oleh masyarakat selaku warga negara dan seperti apa idealnya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat(Umar R et al., 2023)

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan perwujudan tanggungjawab instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui instrumen akuntabilitas secara berkala (Simanjuntak et al., 2023). Menurut Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selain itu, akuntabilitas bertanggungjawab pada pengelolaan pemerintah daerah yang tidak dapat dipisahkan dari anggaran pemerintah daerah (Padmadiani et al., 2023), salah satunya di BPKAD Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota Metropolitan dan salah satu kota terbesar ke-5 di Indonesia. Akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Semarang dapat dilihat dari nilai SAKIP Kota Semarang. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan (Yolanda et al., 2024). BPKAD Kota Semarang sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan LAKIP kepada Walikota Kota Semarang. LAKIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bentuk pertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan akan pelaksanaan program serta kegiatan yang telah diamanatkan Walikota dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis dan perjanjian kinerja. Di samping itu penyusunan LAKIP juga bertujuan sebagai upaya perbaikan bagi BPKAD untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang (Umar R et al., 2023).

Sesuai dengan pencapaian kinerja di BPKAD Kota Semarang berdasarkan hasil evaluasi LAKIP yang telah dilakukan BPKAD Kota Semarang pada tahun 2022-2023 dijabarkan pada sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi pada Tahun 2022	Realisasi pada Tahun 2023
Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,33%	81,88%
	Presentasi Pengelolaan Keuangan Daerah	96,42%	97,88%
	Presentasi Nilai Aset Yang Dikekola	89,77%	98,54%
	Nilai SAKIP	78,21%	80%

Sumber: <https://bpkad.semarangkota.go.id/> , data diolah tahun 2023

Tabel 1.1 menjelaskan hasil evaluasi nilai LAKIP pada tahun 2022 terealisasi 78,21% dengan kategori “BB” artinya sangat baik, sementara hasil evaluasi LAKIP pada tahun 2023 terealisasi 80% dengan kategori “A” artinya memuaskan. tetapi ada beberapa masalah dari pencapaian tersebut yang belum diharapkan dan memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan meningkatkan pemahaman OPD bagi setiap perangkat daerah untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan akuntabel terkait pentingnya realisasi penyerapan anggaran agar bisa dialokasikan secara optimal dan tepat waktu (BPKAD, 2024).

Kejelasan sasaran anggaran yaitu sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik. Tujuannya agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sehingga dapat mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja (Umar R et al., 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Umar R et al., 2023) dan (Risandini et al., 2024) membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Padmadiani et al., 2023) membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Selain perencanaan anggaran, juga terdapat sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan berisi tentang penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif (Novrianti et al., 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Simanjuntak et al., 2023) dan (Andriani & Wati, 2021) membuktikan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan (Azmi et al., 2023) membuktikan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Selanjutnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi yaitu pengendalian internal sebagai sarana evaluasi untuk memastikan bahwa aktivitas di dalam lembaga pemerintah dapat dijalankan dengan efektif dan efisien (Padmadiani et al., 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Harjaningrum & Ardini 2021) dan (Pramita et al., 2023) membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Anto et al., 2022) membuktikan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Selanjutnya anggaran berbasis kinerja diukur berdasarkan pendekatan konsep *value for money*, artinya anggaran digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Pemerintah didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis dan berkomitmen untuk mencapai target serta tolak ukur yang ditetapkan oleh program sebagai standar kinerja. Implikasi anggaran berbasis kinerja diharapkan pemerintah bisa memastikan bahwa anggaran yang digunakan secara maksimal, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi (Marsyela & Rahmawati 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Arwaty 2022) dan (Israr & Syofyan 2022) membuktikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Marsyela & Rahmawati 2023) membuktikan bahwa penerapan anggaran berbasis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Melihat dari fenomena yang terjadi inilah yang membuat daya tarik peneliti untuk meneliti faktor – faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta didukung dengan jurnal penelitian terdahulu. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Simanjuntak et al., 2023) membuat peneliti ingin menguji ulang penelitian tersebut karena adanya perbedaan dalam pengambilan tempat penelitian dan periode penelitian yang dilakukan juga berbeda, maka peneliti mengambil objek di BPKAD Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan yang muncul berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah BPKAD Kota Semarang ?, (2) Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah BPKAD Kota Semarang ?, (3) Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah BPKAD Kota Semarang?(4) Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah BPKAD Kota Semarang?

Penjelasan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini mendorong untuk mengetahui lebih lanjut: (1) Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah BPKAD Kota Semarang, (2) Untuk menguji Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah BPKAD Kota Semarang, (3) Untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah BPKAD Kota Semarang, (4) Untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah BPKAD Kota Semarang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai isu-isu yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Semarang dan bisa menjadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Secara praktik, BPKAD Kota Semarang dapat dijadikan sebagai bahan informasi, refleksi, dan evaluasi untuk memahami pentingnya tujuan anggaran, sistem pelaporan, dan pengelolaan akuntansi agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Kajian Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Stewardship Theory*. Teori ini menjelaskan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* (pemerintah) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal* (rakyat) (Donaldson & Davis, 1991).

Hubungan Teori *Stewardship* dalam penelitian ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Teori *Stewardship* menekankan pada tanggungjawab pegawai pemerintah untuk berkontribusi pada peningkatan kinerja instansi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Stewardship*, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerja, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus mengelola anggaran yang telah dialokasikan untuk program atau kegiatan tertentu untuk kepentingan masyarakat. Teori ini cocok diterapkan dalam organisasi sektor publik pada pemerintahan karena mengutamakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat daripada keuntungan yang diperoleh.

2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disusun serta disampaikan secara sistematis dan melembaga (Rahmawati & Arwaty, 2022).

Menurut (Mulya & Fauzihardani, 2022), menjelaskan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat atau daerah yang dimaksudkan untuk bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya misi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. SAKIP akan menghasilkan laporan yang disebut dengan LAKIP jika sudah berjalan selama satu periode anggaran. LAKIP akan dievaluasi oleh KemenPAN-RB, untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas, juga pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

2.1.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran mempunyai definisi sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dengan tujuan supaya anggaran tersebut bisa dipahami oleh orang yang memiliki tanggungjawab pada perolehan sasaran anggaran (Risandini et al., 2024). Anggaran dibutuhkan untuk mengelola sumber daya seoptimal mungkin demi memperoleh kinerja yang sesuai harapan masyarakat, serta menghasilkan akuntabilitas ke masyarakat (Sanusi & Riyadi, 2023). Menurut (Padmadiani et al., 2023), menjelaskan kejelasan sasaran anggaran dapat membantu mencapai kinerja yang diharapkan, hal ini memudahkan untuk mewujudkan keberhasilan atau kegagalan tugas organisasi dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.4 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan bentuk pernyataan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan kinerja seluruh kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan serta memberikan informasi keuangan yang digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Terkait kewajiban pemerintah dalam sistem pelaporan setiap instansi pemerintah wajib melaporkan atas pencapaian kinerjanya (Marsyela & Rahmawati, 2023). Dimana

pelaporan yang baik itu dibuat secara jujur, objektif, transparan, relevan, tepat waktu dan konsisten untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Novrianti et al., 2022).

2.1.5 Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah sebuah proses pada kegiatan yang dilakukan secara konstan oleh seluruh aparat pemerintah baik itu pimpinan dan pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang tepat, kejelasan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Harjaningrum & Ardini, 2021). Sedangkan berdasarkan definisi (Sanusi & Riyadi, 2023), menjelaskan sistem pengendalian internal merupakan tahapan yang menjadi aktivitas dan tindakan yang dilaksanakan secara berulang oleh pimpinan maupun semua tenaga kerja guna menyakini atas pencapaian tujuan organisasi melalui aktivitas yang efisien, laporan keuangan yang handal, pengamanan aktiva negara, dan taat pada peraturan undang-undang. Sistem pengendalian internal juga diperlukan sebagai tolak ukur dan penaikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi (Permana et al., 2024).

2.1.6 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu metode yang dapat diterapkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan dana yang dikeluarkan bagi beberapa program atau kegiatan suatu pemerintahan (Rahmawati & Arwaty, 2022). Menurut (Israr & Syofyan, 2022) menjelaskan, penerapan anggaran berbasis kinerja dibentuk melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja. Sedangkan menurut pendapatnya (Marsyela & Rahmawati, 2023), implikasi anggaran berbasis kinerja diharapkan pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran digunakan secara maksimal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian (Umar R et al., 2023) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, (2) Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, (3) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Padmadiani et al., 2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Gorontalo, (2) Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Gorontalo.

Penelitian (Risandini et al., 2024) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di BPKAD Kabupaten Merangin, (2) Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di BPKAD Kabupaten Merangin, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Marsyela & Rahmawati, 2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Surabaya, (2) Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Surabaya, (3) Sistem Pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Surabaya.

Penelitian (Pramita et al., 2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Magelang, (2) Pemanfaatan Teknologi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Magelang, (3) Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Magelang, (4) Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Magelang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Anto et al., 2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaporan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, (2) Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.

Penelitian (Israr & Syofyan, 2022) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Padang, (2) Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Padang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Marsyela & Rahmawati, 2023) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Surabaya, (2) Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Surabaya, (3) Sistem Pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Surabaya.

Penelitian (Simanjuntak et al., 2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPKAD Provinsi Sumatera Utara, (2) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPKAD Provinsi Sumatera Utara, (3) Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPKAD Provinsi Sumatera Utara, (4) Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian (Nawipa, 2024) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPKAD Provinsi Papua, (2) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPKAD Provinsi Papua, (3) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPKAD Provinsi Papua.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran merupakan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas, spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya, oleh sebab itu kejelasan sasaran anggaran dapat dilihat dari besar atau kecilnya pengaruh dalam merumuskan sasaran anggaran. kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting dilingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Permana et al., 2024).

Hal ini berkaitan dengan teori *stewardship* menjelaskan dimana kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi faktor yang mempengaruhi kepentingan organisasi. Dengan anggaran yang jelas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, maka kinerja dan efisien penggunaan anggaran diharapkan dapat meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan rendah, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bisa menurun (Risandini et al., 2024). Oleh sebab itu, anggaran harus dikelola dengan jelas dan tepat agar mudah dipahami oleh pegawai yang bertanggungjawab untuk menyusun anggaran, sehingga dapat membantu tujuan yang ingin dicapai.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Umar R et al., 2023), (Risandini et al., 2024), dan (Sanusi & Riyadi, 2023) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.2 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem pelaporan merupakan proses penyusunan dan penyampaian hasil pelaksanaan tugas yang meliputi capaian kinerja program dan kegiatan, serta realisasi keuangan dan fisik. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode tertentu. Selain itu, laporan perlu disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang baik dapat membandingkan kinerja keuangan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, juga mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas (Rahman & Yusuf, 2021).

Hal ini berkaitan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan sistem pelaporan akan fokus pada hasil yang dicapai untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan yang baik mengenai kinerja instansi, penggunaan anggaran, dan pencapaian target disampaikan secara transparan kepada publik. Hal ini, bisa meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Andriani & Wati, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Doni et al., 2023), (Andriani & Wati, 2021), dan (Pramita et al., 2023) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

H2: Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem pengendalian internal merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kejelasan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Pengendalian internal sangat diperlukan, supaya semua kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tata kelola yang baik dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan tetap sebagaimana mestinya (Padmadiani et al., 2023).

Hal ini terkait dengan teori *stewardship* menjelaskan pengendalian internal menekankan pada tanggung jawab dan integritas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil dari pengendalian internal yang efektif dan akuntabilitas kinerja

yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Begitu juga sebaliknya, pengendalian internal yang kurang efektif, dapat merusak rencana yang telah disepakati(Rahma et al., 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pramita et al., 2023), (Padmadiani et al., 2023),(Harjaningrum & Ardini, 2021)menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

H3: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.4 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu metode yang dapat diterapkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan dana yang dikeluarkan untuk beberapa program atau kegiatan suatu pemerintahan. Intinya yaitu anggaran berbasis kinerja menekankan pada hasil kinerja dan bukan kepada besar kecilnya sisa anggaran yang telah terealisasi dan setiap alokasi dana harus dapat diukur dari input yang sudah ditetapkan. Untuk menghasilkan penyelenggaraan Anggaran Daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keseluruhan siklus anggaran(Rahmawati & Arwaty, 2022).

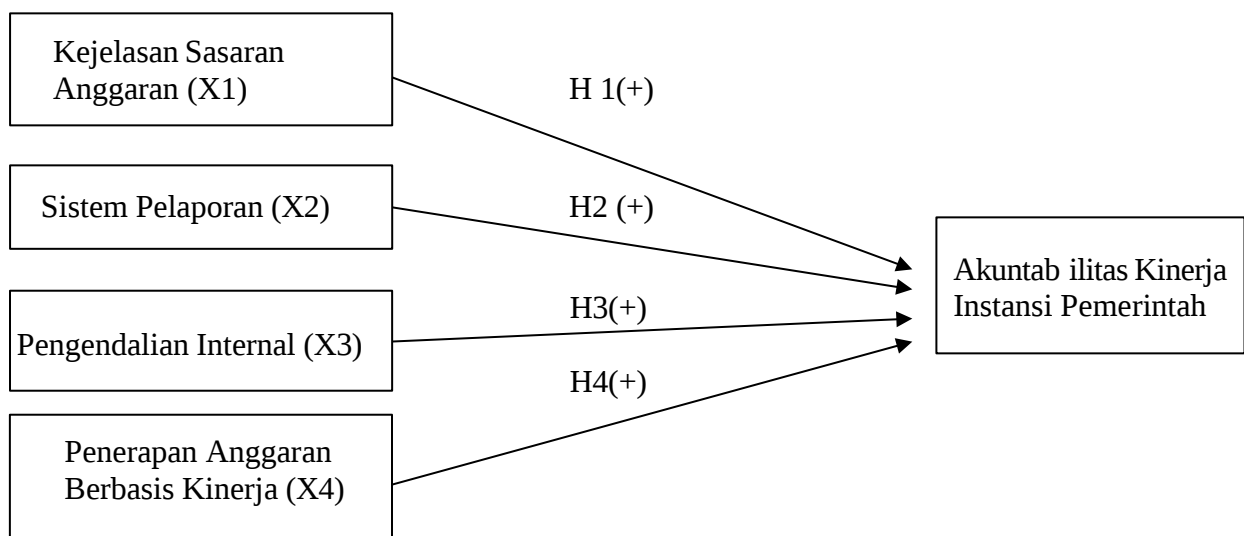
Hal ini berkaitan dengan teori *stewardship* menjelaskan penganggaran yang mengikat antara alokasi anggaran dengan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, alokasi anggaran dengan pencapaian kinerja, menghubungkan pendanaan dengan hasil yang dicapai melalui informasi yang sistematis. Hal ini, dapat meningkatkan efisiensi dan fokus pada hasil. Oleh karena itu, anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(Israr & Syofyan, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Arwaty, 2022), (Israr & Syofyan, 2022), dan (Saptaniur & Rofingatun, 2022) menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

H4: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.4 Model Penelitian

Gambar 1 Model Peneliti



3. Model Penelitian

3.1 Populasi

Populasi merupakan objek penelitian yang mempunyai karakteristik dan kualitas tersendiri sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKAD Kota Semarang.

3.2 Sampel

Sampel merupakan sekelompok kecil dari seluruh populasi. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, karena teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil nantinya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pejabat di BPKAD Kota Semarang berdasarkan tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam menyusun, menyajikan, mengelola dan melaporkan keuangan. Pejabat yang dimaksud meliputi seluruh kepala bidang, kepala subbagian, Sub Koordinator dan staff yang berstatus ASN.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut (Loppies et al., 2023), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan mengenai kinerja serta tindakan dari suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atas pertanggungjawaban tersebut. Menurut (Mardiasmo, 2018), akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki 4 indikator yang harus dipenuhi dalam organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability For Probity And Legality*)
2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu karakteristik sistem penganggaran yang menunjukkan sejauh mana anggaran ditetapkan dengan jelas agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Isnanto et al., 2019). Menurut (Agustin, 2018) variabel kejelasan sasaran anggaran dapat diukur dengan indikator, yaitu :

1. Kesesuaian rencana kerja dan anggaran dengan RAPBN
2. Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik
3. Kejelasan yang tinggi dalam mencapai sasaran anggaran (RBA)
4. Faktor – faktor yang mendukung tujuan instansi
5. Ketepatan anggaran dan realisasi

3.3.2.2 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan (Pratama et al., 2020). Menurut (Widaryati & Pancawardani, 2020) variabel sistem pelaporan dapat diukur dengan indikator, yaitu:

1. Penyajian laporan keuangan secara lengkap.
2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi.

3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus.
4. Laporan keuangan dapat diuji.
5. Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

3.3.2.3 Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang tercapainya tujuan dari suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang dilakukan secara terus – menerus oleh pimpinan dan pegawai (Loppies et al., 2023). Menurut (Asmawanti et al., 2020) variabel pengendalian internal dapat diukur dengan indikator, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

3.3.2.4 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* pemerintah yang berkaitan erat dengan visi misi pemerintah, serta perencanaan strategi pemerintah (Sofiani & Retnani, 2019). Menurut (Illayuniga & Rahayu, 2019) variabel anggaran berbasis kinerja dapat diukur dengan indikator, yaitu:

1. Perencanaan anggaran
2. Pelaksanaan anggaran
3. Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran
4. Evaluasi kinerja

3.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Data tersebut berupa data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara menyebar kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan kepada responden sasaran dan sesuai kualifikasi. Alur pengumpulan data yaitu dengan mengedarkan kuesioner kepada responden terkait untuk menyerahkan dan mengambilnya kembali ketika sudah diisi. Tujuannya adalah untuk mendapat informasi lebih akurat dari responden. Setelah itu, data yang diperoleh kemudian peneliti mengolah, menguji dan menganalisis data dengan menggunakan alat analisis Smart PLS versi 4.0 Selain itu penelitian ini menggunakan dua tahapan pengujian yaitu Uji Outer model dan Uji Inner Model.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk memudahkan memperoleh data yang telah diukur dengan cara memberi skor atau nilai, dimana responden menyatakan pendapatnya terhadap pertanyaan. Kemudian setiap pertanyaan tersebut dikategori dengan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju atau sangat setuju dengan memberikan tanda $\surd$ pada salah satu kolom. Adapun skor dan jawaban yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diberi skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Diberi skor 2 : Tidak Setuju (TS)
3. Diberi skor 3 : Netral (N)
4. Diberi skor 4 : Setuju (S)
5. Diberi skor 5 : Sangat Setuju (SS)

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan mendeskripsikan pengujian demografi responden penelitian (nama, responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Selain itu, menghubungkan teori dan data dalam menentukan kriteria rata-rata variable, nilai minimal, maksimal, dan deviasi standar.

3.5.2 Uji Kelayakan Instrumen (Outer Model)

Model pengukuran pada Analisis SmartPLS adalah untuk menguji instrumen yang digunakan dalam penelitian apakah layak atau tidak dan apakah suatu variabel mempunyai hubungan dengan beberapa indikatornya. Pengukuran ini mempunyai dua tahap pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas merupakan konsep pengukuran yang menyatakan suatu kevalidan dari instrumen. Penelitian ini menggunakan uji validitas yang terdiri dari uji validitas konvergen dan nilai AVE serta uji validitas konvergen. Pengukuran uji validitas dapat dilihat dari nilai *outer loading* dengan ketentuan harus lebih besar dari nilai kritis 0,7. Sedangkan nilai AVE menunjukkan kemampuan variabel dalam menjelaskan varians yang berasal dari indikatornya dengan ketentuan lebih besar dari nilai kritis yaitu sebesar 0,5 (Hair et al., 2014). Sementara uji validitas diskriminan yaitu mengukur sejauhmana suatu variabel dapat berbeda dari variabel lainnya dan diuji secara statistik. Validitas diskriminan dapat dilihat dengan nilai *cross loading* untuk variabel harus 0,70. Nilai validitas diskriminan dapat diterima jika nilai AVE > korelasi antar konstruk laten (Hair et al., 2014).

2. Uji Reabilitas

Reliabilitas merupakan aspek penting dalam menentukan kemampuan kuesioner dapat konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur konstruk. Reliabilitas dalam pengujiannya yaitu terdiri dari *Cronbach's Alpha* dengan nilai di atas 0,7 dan nilai *Composite Reliability* dengan ketentuan nilai sebesar di atas 0,7 (Santosa, 2018).

3.5.3 Model Struktural (Inner Model)

Struktural (Inner Model) Uji pada model *structural* yang dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. Model *structural* memiliki tiga pengukuran yaitu mengukur nilai koefisien

β (mengetahui arah hubungan), uji t (mengetahui kemaknaan hubungan), dan nilai koefisien determinasi (R^2) mengetahui nilai penjelasan variabel- variabel respon (Santosa, 2018).

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Alat uji ini digunakan untuk menguji seberapa besar validnya hubungan variabel dependen dengan variabel independent. Koefisien Jalur (path coefficients) adalah nilai yang dihasilkan untuk dapat melihat hubungan pada setiap variabel. Nilai koefisien jalur berada pada rentang -1 sampai

+1. Dengan rentang +1 mewakili hubungan positif yang kuat dan rentang -1 mengindikasikan hubungan yang negatif. Pengujian koefisien jalur pada SEMPLS dilakukan melalui suatu prosedur yang ada pada bootstrapping Hubungan dapat diterima jika $p\text{-value} < 0,05$ sedangkan $p\text{-value}$

$> 0,05$ artinya ditolak. Sedangkan pengaruh hasil signifikan adalah $t\text{-statistic} > 1,96$ (Hair et al., 2014).